

Luther's Influence on Calvin's political Transformation

Dr. Tjahyadi Chandra, M.Th., D.Th.

ABSTRACT

The significance of John Calvin for modern times is clearly expressed in these words: "The sixteenth century was an extraordinary century". Of all the people who made this century great, only Calvin has made broad contributions to the wider country. Calvinism is the name given to the system of thought that was revealed to us by John Calvin. He is recognized as the main initiator of this system, even though he is not the creator of the ideas contained in it. Calvin's theological views, along with other great leaders of the Protestant Reformation (Augustine and Martin Luther), are known as the rise of Augustinianism, which in turn is the same as the revival of the teachings of the Apostle Paul. But it was Calvin who first presented the basics of this view for modern times, in the systematic form and with the special application that we know from his time as Calvinism. Calvinism does not limit itself to theology; Calvinism is a comprehensive system of thought, which includes views on politics, society, science, and art, in addition to theology. A Calvinist tries to apply the truth of the Scriptures. Calvinism does not stop at the church structure, but extends within one system of life, and Calvinism elevates Christianity to the highest spiritual beauty; Calvinism created the church structure, which was a prerequisite for the confederate state; Calvinism developed a political scheme, which gave birth to constitutional government, both in Europe and in America; Calvinism promotes holiness through high moral standards in our social environment. Calvinism places under Church and State, under society and household circles, a strict philosophical conception. This dissertation is written in a qualitative method, "analyzing the data collected in the study, the main findings resulting from the data analysis". Qualitative research usually uses descriptive methods such as observation, data study, using data that can be analyzed through data or literature studies. This dissertation is written from the background of John Calvin's life, his conversion, even since he was a child, Calvin was happy to study law. The author explains the historical context of the institute, as well as the influence of the concept of civil government from Augustine (City of God) and Martin Luther (Two Kingdoms); the explanation is continued with the concept of civil government according to John Calvin, through the principles of government, also explains Calvin's ideas in relation to theocracy.

Keywords: *Protestant Reformation; City Of God; The Principles Of Government; Theocracy; Calvinism; Pemerintahan Sipil, Negara dan Gereja, Two Kingdoms.*

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Yang memengaruhi munculnya pemikiran Luther tentang Gereja dan Negara adalah tidak terlepas dari situasi GKR pada Abad Pertengahan di Eropa Barat. H. Berkhof mencatat bahwa sejak abad ke-V Gereja telah di duniawikan. Artinya bahwa Gereja adalah di bawah perlindungan kaisar. Kaisar berperan sebagai kepala gereja. Dengan demikian Gereja-Negara disusun selaku badan hukum yang berpusatkan

istana kaisar.¹ Uskup Roma juga menyebutkan dirinya sebagai wakil Kristus yang memiliki dua kekuasaan, yaitu kuasa untuk menganugerahkan dan kuasa untuk mengalihkan kerajaan-kerajaan. Artinya semua uskup di seluruh dunia harus meminta penahbisan dan pengukuhan darinya. Selain daripada itu, ia memiliki hak untuk membuat peraturan-peraturan ibadah, perubahan dalam sakramen, dan ajaran-ajaran dalam gereja.²

Di Jermanlah yang menjadi tempat lahirnya reformasi yang terletak di tengah Eropa. Di Negara Jermanlah raja-raja atau pangeran berkuasa penuh atas daerahnya masing-masing.³ Banyak raja mulai mengatur urusan negerinya sendiri, wilayahnya masing-masing dan tidak mengakui klaim supremasi gereja atau Paus atas Negara⁴, dan bangkitnya kelas pedagang dan pengusaha di bidang perdagangan juga industri yang menjadi cikal bakal kapitalisme. Hal inilah yang menggeser dominasi *feodalisme* yang sudah berlangsung berabad-abad yang di dalamnya Gereja juga terlibat. Karena Gereja sejak lama berperan sebagai soko guru sistem *feodalisme*, maka tidak heran bila Gereja (GKR) juga menjadi sasaran sikap kritis tersebut.⁵ Para Imam tidak menjadi teladan bagi masyarakat, tetapi yang terjadi adalah mencari keuntungan diri sendiri. Di satu pihak pemikiran-pemikiran mistik Abad Pertengahan muncul kembali di dalam Thomas Muncher. Muncher menegaskan bahwa “kemiskinan” itu terutama kemiskinan akan harta benda, kemelaratan. Lalu ia menyimpulkan hanya orang-orang miskinlah yang dapat menerima roh, terang batiniah itu (Matius 5:3). Sebaliknya orang kaya justru menjadi orang-orang fasik karena kekayaan mereka. Sehingga pada tahun 1525 terjadi pemberontakan para petani⁶ kepada kaum penguasa. Mulanya Luther menyalahkan para penguasa ini, tetapi ketika pemberontakan itu berubah menjadi pertumpahan darah, dia juga menyerang para petani.⁷ Alasan mereka melakukan pemberontakan ini adalah kutipan-kutipan Luther yang berbicara tentang “kebebasan”. Mereka menafsirkan kebebasan itu sebagai kebebasan dari kewajiban-kewajiban yang tidak wajar kepada tuan-tuannya. Akan tetapi maksud Luther tentang “kebebasan seorang Kristen” itu adalah kebebasan dan tuntutan hukum Taurat bukan berarti bebas dari kerja rodi dan sebagainya.⁸ Akibat peristiwa ini, Luther tidak percaya lagi bahwa rakyat sendiri bisa menjalankan pemerintahan yang teratur dalam Negara. Melalui peristiwa ini, Luther menyetujui sistem yang telah digunakan oleh raja Sachsen yang mengatakan bahwa: pemerintah membagi daerah atas distrik-distrik, dan setiap distrik mengangkat seorang pejabat yang diberi

¹H.Berkhof, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: BPK-GM; 1996), 50-51.

²Theodore B. Tappert, *Konkord konfensi Gereja Lutheran*, (Jakarta: BPK-GM, 2004), 414.

³Mangisi SE. Simorangkir, Op.Cit., 29.

⁴H.Berkhof, Op.Cit., 138.

⁵Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran didalam di Sekitar Gereja*, (Jakarta: BPK-GM, 2000), 26.

⁶Th. VandeEnd, Op.Cit., 175.

⁷Mangisi SE. Simorangkir, Op.Cit., 32.

⁸Th. Van de End, Op.Cit., 175-176.

gelar “*superintendent*”.⁹ Melalui peristiwa ini Luther mencanangkan protes terhadap ajaran dan praktik Gereja.¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh Martin Luther (*two kingdoms*) dalam konsep Martin Luther tentang Pemerintahan Sipil dan Gereja ?

1.3. Batasan Masalah

Konsep Martin Luther sebagai dasar dari Reformasi berpengaruh terhadap Calvin dalam hal pemerintahan sipil dan Gereja.

1.4. Asumsi Penelitian: Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis berasumsi bahwa, Latar belakang Calvin yang sangat berminat terhadap politik dan sangat memengaruhi Calvin, ia menulis buku *Institutio*, sehingga memberi banyak inspirasi kepada pejabat-pejabat pemerintahan bagaimana mereka memerintah dengan baik dan bertanggung-jawab!

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian: Menelusuri latar belakang Calvin dan hal-hal yang memengaruhinya dan gagasan pemerintahan sipil yang ada di dalam buku *Institutio* Kitab IV, Bab 20.

Manfaat Penelitian: Penelitian dimaksudkan untuk menemukan dan memperkaya kajian teoritis terhadap latar belakang kehidupan Calvin. Memberikan kontribusi pemahaman, bahwa gagasan pemerintahan sipil Calvin memengaruhi banyak negara, Buku *Institutio* menjadi buku yang sangat penting dalam menegakkan kebenaran Firman Tuhan maupun membereskan negara-negara yang pemimpin-pemimpinnya tidak mengikuti aturan kebenaran.

1.6. Metodologi Penelitian,

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.¹¹ Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode deskriptif seperti observasi, wawancara, dan studi kasus untuk menggambarkan perilaku daripada menggunakan data yang bisa dianalisis secara statistik.

Penelitian kualitatif juga merupakan penyelidikan sejarah dari John Calvin untuk *membantu memperluas pengalaman kita, membuat kita lebih mengerti dan lebih menghargai tingkah laku manusia dan segala keunikannya*.¹² Dengan mengetahui tentang masa lampau, dapat mengetahui lebih baik keadaan sekarang. Dengan menggunakan fakta sejarah tidak dapat meramal secara akurat, *meskipun demikian, dengan mempelajari sejarah kita dapat mengenal usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya*.¹³

⁹Ibid,177.

¹⁰H.Berkhof, Op.Cit.,120.

¹¹Burton, L.J., *An Interactive Approach To Writing Essays And Research Reports In Psychology*. Milton, Queensland: John Wiley and Sons Australia, Ltd., 71.

¹² Consuelo G. Sevilla & Team, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, 43.

¹³ Ibid.

Sejarah yang akan kita bahas dalam disertasi ini adalah tokoh utamanya adalah Calvin, yang bukunya adalah *Institutio*, khususnya Bab. IV, pasal 20, tentang Pemerintahan Sipil. Calvin telah dicirikan sebagai tokoh dengan satu buku dan buku yang satu itu adalah *Institutes* edisi tahun 1559. *Institutio* harus dibaca di dalam terang tafsiran-tafsiran Calvin dan hal sebaliknya juga benar. Sang pakar dogmatika, sang ekseget, dan sang hamba Tuhan adalah pribadi yang satu dan sama di dalam diri Calvin sendiri.¹⁴

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Calvin yang sering memikirkan tentang negara dan Gereja dan bagaimana seharusnya keduanya dihubungkan. Buku terakhir dari keempat buku yang membentuk mahakaryanya, yaitu *Institutes of the Christian Religion*, sepenuhnya membahas topik tersebut. Tentu, ia memberikan jauh lebih banyak waktu dan pikiran bagi Gereja daripada bagi negara, mengkhususkan sembilan belas bab di dalam buku yang sangat penting di dalam *Institutes* itu untuk Gereja, dan hanya satu bab, yang terakhir, untuk pemerintahan sipil.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah kepustakaan atau buku-buku dan wawancara yang menunjang jurnal ini. Dokumentasi jika diperlukan dan observasi dilakukan sehubungan dengan pengaruh gagasan teologis Calvin terhadap Negara dan Pemerintahan masa kini.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan, “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an on going activity that occurs throughout the investigative process rather after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.¹⁵

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Data-data tentang Calvin telah dikumpulkan secara detail dan sekarang sudah didisplaykan, sehingga peneliti bisa lebih jelas untuk mengerti siapa tokoh Calvin itu dan bahkan dapat mengenal latar belakang kehidupannya, pendidikannya, karyanya dan pengaruhnya.

Salah satu pekerjaan yang selalu di cari oleh setiap insan adalah “Kekuasaan”. Untuk mendapatkannya banyak orang menghalalkan berbagai cara. Hal inilah yang terjadi di dalam GKR (Gereja Katolik Roma) pada *Abad Pertengahan* di Eropa Barat. Tujuan dan fungsi Gereja-Negara tidak jelas bahkan semakin memburuk. Oleh situasi

¹⁴ Herman J. Selderhuis, *Buku Pegangan Calvin*, Surabaya: Penerbit Momentum, 2017, 262.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011, 245.

tersebut Luther menerapkan salah satu pokok pikirannya tentang “hubungan gereja dan Negara” yang merupakan salah satu unsur yang terpenting melalui ajarannya “dua kerajaan”. Oleh sebab itu lewat disertasi ini kita dapat menemukan beberapa gagasan-gagasan Luther tentang pandangannya terhadap Gereja dan Negara.

BAB II AJARAN LUTHER MENGENAI DUA KERAJAAN

Periode Abad Pertengahan menyaksikan perkembangan “ajaran tentang dua tingkatan kehidupan”: *temporal* dan *spiritual*. Menurut pandangan ini, yang secara aktif dipromosikan oleh pendukung-pendukung maneuver politis Paus, rohaniwan termasuk ke dalam “tingkatan spiritual” dan orang awam ke dalam “tingkatan temporal”. Kedua tingkatan, atau bidang, atau lingkungan kewibawaan ini sangat berbeda. Meskipun tingkatan spiritual dapat melakukan campur tangan (*intervensi*) kedalam masalah-masalah dari tingkatan temporal, yang belakangan ini tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi ke dalam tingkatan yang terdahulu itu. Yang mendasari teori ini adalah suatu sejarah konflik yang panjang antara kekuasaan Paus dan kekuasaan sekuler, khususnya selama periode kepausan dari Avignon.¹⁶

Semua orang Kristen benar-benar dari tingkatan spiritual dan tidak ada perbedaan diantara mereka kecuali dalam hal fungsi. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 12:12-13 bahwa kita adalah satu tubuh dengan setiap anggota mempunyai fungsinya sendiri yang melayani saudaranya yang lain. Ini adalah karena kita mempunyai satu baptisan, satu Injil dan satu iman, dan semua adalah orang Kristen, satu sama lain adalah sama; karena baptisan, Injil, dan iman sendiri membuat kita spiritual dan suatu umat Kristen . . . Dan dengan demikian berikutnya, tidak ada perbedaan yang benar antara orang awam dan imam, antara pangeran dan uskup, antara mereka yang hidup didalam biara dan mereka yang hidup didalam dunia. Satu-satunya perbedaan tidaklah ada kaitannya dengan status, tetapi dengan fungsi dan pekerjaan yang mereka lakukan.

Pengakuan atas *kesederajatan* dari semua orang percaya itu dengan demikian tidak mengimplikasikan *identitas* dari semua orang percaya. “Melalui baptisan, kita semua adalah imam-imam yang dikuduskan”. Semua orang percaya, berdasarkan baptisan mereka, termasuk ke dalam tingkatan spiritual.¹⁷ “Kristus tidak memiliki dua tubuh, satu temporal, yang lain spiritual. Hanya ada satu kepala dan satu tubuh”. Kaum awam, dengan demikian mempunyai hak untuk menuntut suatu persidangan¹⁸ umum untuk membaharui gereja; dan, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh tajam. Luther mengingatkan para pembacanya bahwa Kaisar Roma, Konstantin, adalah yang bertanggung-jawab untuk memanggil konsili¹⁹ yang paling penting didalam sejarah gereja.

¹⁶ Lihat W. Ullmann, *Medieval Papalism: The Political Theories of the Medieval Canonists* (London, 1949); M.J. Wilks, *The Problem of Sovereignty: The Papal Monarchy with Augustus Triumphus and the Publicists* (Cambridge, 1963).

¹⁷ Perhatikan bahwa Luther mampu mengasumsikan bahwa semua orang Jerman dibaptis.

¹⁸ Konsili.

¹⁹ Konsili Nicea, yang bersidang tahun 325.

Jadi, setelah menghapuskan perbedaan dari Abad Pertengahan antara tingkatan “temporal” dan “spiritual”, Luther melanjutkan untuk mengembangkan suatu teori alternatif tentang bidang-bidang kekuasaan yang didasarkan atas perbedaan antara “Dua Kerajaan” atau “Dua Pemerintahan”.²⁰ Ajaran tentang “Dua Kerajaan” inilah yang sangat penting bagi pemikiran sosial Luther dan yang sekarang ini menjadi pusat perhatian kita.

Luther menarik suatu perbedaan antara pemerintahan “spiritual” dan “duniawi” atas masyarakat. Pemerintahan “spiritual” dari Allah diberlakukan melalui Firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Orang percaya yang “berjalan menurut Roh” tidak memerlukan tuntunan lebih lanjut dari siapa pun tentang bagaimana ia seharusnya bertindak: ia benar-benar sejalan dengan kehendak ilahi dan bertindak sesuai dengannya. Sama seperti sebatang pohon yang baik tidak memerlukan instruksi-instruksi untuk menghasilkan buah, demikian pula orang percaya yang benar tidak memerlukan perundang-undangan untuk menuntun tingkah lakunya. Sama seperti sebatang pohon menghasilkan buah secara wajar, demikian pula orang percaya secara wajar bertindak secara moral dan bertanggung jawab. Luther juga menekankan perbedaan antara konsepsi manusia dan konsep ilahi tentang “kebenaran” atau “keadilan”, suatu tema yang merupakan karakteristik dari “teologi salib”. Ukuran-ukuran Allah tentang keadilan mempersoalkan semua perkara di dunia ini.²¹

Pemerintahan *duniawi* Allah diberlakukan melalui raja-raja, pangeran-pangeran dan hakim-hakim, dengan mempergunakan pedang dan hukum Negara. Semua ini tidak mempunyai kewenangan dalam hal ajaran. “Ketika pangeran-pangeran dan raja-raja mencoba untuk mengubah dan menjadi tuan atas Firman Allah dengan suatu cara yang sedemikian sombong – sesuatu yang sama terlarangnya bagi mereka seperti kepada pengemis yang paling hina–mereka sedang menjadi Allah mereka sendiri”. Bidang kewenangan mereka yang sebenarnya adalah menyangkut perkara-perkara dunia, hal-hal milik Caesar daripada milik Allah. Meskipun penguasa-penguasa yang sementara sifatnya ini termasuk kedalam dunia sekuler, namun mereka sedang melaksanakan pekerjaan Allah. Apakah pangeran-pangeran atau hakim-hakim ini adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh atau bukan, mereka tetap melaksanakan suatu peran ilahi. Allah telah menetapkan bahwa keteraturan akan dikenakan atas ciptaan untuk mempertahankan perdamaian dan untuk menekan dosa. Ada tiga tingkatan hierarkis, atau “tatanan”, di dalam suatu masyarakat Kristen: *rumah tangga* atau *keluarga*, dengan ayah sebagai kepala;²² *pangeran-pangeran* dan *hakim-hakim*, yang melaksanakan pemerintahan sekuler; dan *rohaniawan*, yang melaksanakan

²⁰ Terdapat ambiguitas yang sangat besar dalam penggunaan Luther atas istilah-istilah seperti “kerajaan” dan “pemerintah”: lihat W.D.J. Cargill Thompson, “*The Two Kingdoms*” and the “*Two Regiments*”: Some Problems of Luther’s *Zwei-Reiche-Lehre*” dalam *Studies in the Reformation: Luther to Hooker* (London, 1980), 42-59.

²¹ Lihat F. Edward Cranz, *An Essay on the Development of Luther’s Thought on Justice, Law, and Society* (Cambridge, Mass, 1959), untuk analisis lengkap atas pokok masalah ini.

²² Luther mengacu pada Roma 13:1-7 dan 1 Petrus 2:13-14 untuk mendukung pernyataan ini.

pemerintah spiritual. Semuanya ini didasarkan atas Firman Allah dan merefleksikan kehendak ilahi untuk membangun dan memelihara bidang duniawi.

Jadi, Allah memerintah gereja dengan Roh Kudus melalui Injil dalam suatu cara yang dari dirinya semua paksaan disingkirkan; dan Ia memerintah dunia dengan pedang kekuasaan sekular. Hakim-hakim berwenang untuk memakai pedang guna memaksakan hukum, bukan karena pada dasarnya kekerasan dibenarkan, tetapi oleh karena kekerasan dari dosa manusia. Seandainya tidak ada dosa manusia, tidak perlu ada paksaan: semua akan mengakui kebijaksanaan Injil dan mengubah tingkah laku mereka menurut Injil itu. Allah mendirikan peraturan politis untuk mengendalikan keserakahan dan kejahatan manusia, mereka itu sendiri merupakan hasil dari kecenderungan-kecenderungan dosa. Dengan demikian, kewenangan spiritual dari gereja bersifat membujuk²³, tidak memaksa, dan menyangkut jiwa seorang individu daripada tubuhnya atau harta miliknya. Kewenangan temporal dari Negara bersifat memaksa daripada membujuk serta menyangkut tubuh dan harta milik seorang individu daripada jiwanya. Kritik yang fundamental dari Luther atas sistem pemerintahan paus dari Abad Pertengahan adalah bahwa sistem itu telah mencampuradukkan kedua bidang kekuasaan ini, khususnya melalui sistemnya tentang hukum kanon.

Meskipun Luther dengan hati-hati membedakan kedua bidang kekuasaan ini, dalam pengertian baik ruang lingkup dan juga sumber mereka, ia berpegang bahwa keduanya tidaklah bertentangan satu terhadap yang lain, tetapi hanya merupakan aspek-aspek yang berbeda dari hal yang sama – pemerintahan Allah atas dunia-Nya yang telah jatuh dan berdosa ini. Teologi politis Luther dengan demikian bersifat *pragmatic*. Melihat kenyataan-kenyataan politis dari situasinya di Wittenberg dan kebergantungannya pada dukungan politis dari pangeran-pangeran Jerman, Luther memperkuat kewenangan politis mereka dengan melandaskannya di dalam pemeliharaan ilahi. Allah memerintah dunia, termasuk gereja, melalui pangeran-pangeran dan hakim-hakim. Gereja berada di dalam dunia dan dengan demikian harus menundukkan dirinya pada peraturan dari dunia.

Pengertian hubungan antara Gereja dan Negara ini telah menjadi obyek kritik yang hebat. Etika sosial Luther telah dijelaskan sebagai bersifat mengalah²⁴ dan menolak aksi²⁵ yang selanjutnya mendorong orang Kristen untuk membiarkan struktur-struktur sosial yang tidak adil. Luther lebih menyukai penindasan terhadap aksi revolusi. Etika Kristen, tetapi bukan moralitas manusia, didasarkan atas ajaran membenaran hanya oleh iman.

1. Semua orang Kristen mempunyai suatu tanggung jawab berwarga Negara dan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan.
2. Moralitas Khotbah di Bukit berlaku untuk kehidupan setiap orang Kristen, tetapi tidak merupakan keharusan bagi setiap keputusan yang dapat dibuat oleh orang-orang Kristen bila mereka memegang jabatan yang menyangkut kepentingan umum.

²³Persuasif.

²⁴Defeatist.

²⁵Quietist

3. Negara secara ilahi telah disahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat, dan tidak seharusnya, diusahakan oleh Gereja untuk mencapainya. Dengan kata lain, lingkungan pengaruh dan wewenang mereka berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
4. Allah memerintah Gereja melalui Injil, tetapi merasa wajib untuk memerintah dunia yang berdosa ini dengan hukum, kebijaksanaan hukum alam dan paksaan.

Suatu kedudukan yang serupa dikembangkan oleh Calvin dalam *Institutio* edisi 1536: bentuk pemerintahan apa pun – apakah itu merupakan suatu monarki, suatu aristokrasi, atau suatu demokrasi – sama-sama sah dan sama-sama pula berwenang untuk melaksanakan jabatan yang ditetapkan secara sorgawi itu. Mungkin sadar akan pengaruh yang kuat dari ide-idenya itu, yang akan terjadi didalam konteks-konteks politis yang beranekaragam dan berbeda, Calvin menegaskan (tanpa menghiraukan kekuatirannya yang jelas berkenaan dengan monarki) bahwa suatu pemahaman yang ditentukan secara alkitabiah tentang hakikat Gereja konsisten dengan bentuk pemerintahan sipil apa pun yang kebetulan didirikan.

BAB III. PANDANGAN MARTIN LUTHER TENTANG HAKIKAT GEREJA DAN NEGARA

III.1. Pandangan Martin Luther tentang Hakikat Gereja

Hakikat Gereja menurut Luther adalah perefleksian penekanan atas firman Allah. Firman Allah berjalan terus untuk menaklukkan dan kemanapun ia akan menaklukkan dan mendapat kesetiaan yang benar kepada Allah dan Gereja. Injil adalah sesuatu yang esensial bagi identitas Gereja, “di mana firman itu ada di sana ada iman, dan dimana ada iman dan disana ada Gereja yang benar”. Luther juga mengatakan bahwa Gereja yang kelihatan dibentuk oleh pemberitaan firman Allah. Lembaga Gereja ini merupakan alat anugerah yang ditentukan secara ilahi. Disamping itu juga, Luther mengatakan bahwa “Gereja yang palsu hanya mempunyai rupa yang kelihatan saja, meskipun ia memiliki jabatan-jabatan Kristen”. Dengan kata lain, gereja abad pertengahan telah menyerupai gereja yang sebenarnya tetapi dia benar-benar sesuatu yang berbeda.²⁶ Luther menerima pandangan Augustinus tentang Gereja sebagai suatu badan “campuran”. Artinya Gereja harus dilihat sebagai Gereja yang keanggotaannya bercampur baik orang-orang kudus maupun orang-orang berdosa.²⁷

III.2. Pandangan Martin Luther tentang Negara

Luther memandang Negara sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh dunia dan manusia harus tunduk kepada Allah. Dengan demikian maka kesetiaan manusia kepada penguasa menjadi tanpa

²⁶ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, (Jakarta: BPK-GM; 2002) 249-250.

²⁷ Ibid, 251.

syarat. Luther melihat kesetiaan warga Negara kepada pemimpinnya sebagai hal yang rohani dalam kerangka hubungan manusia dengan Allah.²⁸

Dalam katekismus besar Luther, juga disebutkan bahwa kuasa itu berasal dari Allah. Luther meneruskan penjelasannya yang mengatakan bahwa pemerintah tercakup di dalam kedudukan orang tua. Artinya ketaatan kepada penguasa adalah ketaatan kepada seorang bapak, sebab pejabat bukan hanya bapak dari satu keluarga melainkan bapak dari rakyat. Para penguasa bagaikan orang tua²⁹ dan penguasa itu meneladani Kristus. Artinya ialah bahwa seorang penguasa harus mengosongkan dirinya seperti Kristus. Ia tidak mengeksploitasi kekuasaan demi kepentingannya, melainkan demi kepentingan orang lain.³⁰ Negara tidak boleh merebut hak-hak Allah. Allahlah yang memerintah jiwa-jiwa bukan Negara. Luther mempertegas bahwa tugas tanggung jawab pemerintah atau penguasa adalah mempraktekkan keadilan, mengizinkan kebebasan bagi setiap orang dalam melaksanakan kepercayaan, membela Negara dari semua musuh-musuhnya, dan memuliakan Tuhan.

III.3. Hubungan Gereja dan Negara menurut Martin Luther

Dalam menjelaskan hubungan antara Gereja dan Negara, Luther menggunakan teori atau ajaran tentang “dua kerajaan”³¹ atau “dua pemerintahan”. Luther menarik suatu perbedaan antara pemerintahan “spiritual” yang berasal dari Allah yang diberlakukan melalui firman Allah dan tuntunan Roh Kudus, dan pemerintahan “duniawi” Allah diberlakukan melalui raja-raja, pangeran-pangeran dan hakim-hakim dengan mempergunakan pedang dan hukum Negara. Luther juga menekankan perbedaan antara konsepsi manusia dan konsepsi Ilahi tentang “kebenaran” atau “keadilan”, suatu tema yang merupakan karakteristik dari “teologi salib”. Ukuran Allah tentang keadilan mempersoalkan semua perkara di dunia ini. Luther mengatakan bahwa keteraturan akan dikenakan untuk menciptakan kedamaian dan untuk menekan dosa dan semua ini didasarkan atas firman Allah dan merefleksikan kehendak Ilahi untuk membangun dan memelihara bidang duniawi.³² Atau dengan kata lain, Allah memberi kepada Gereja kuasa untuk mengurus kehidupan rohani dari umat yang sudah berada dalam lingkungan kerajaan Allah, sedangkan kepada Negara Allah memberikan kuasa mengurus kehidupan duniawi untuk menertibkan orang-orang jahat, sekaligus menolong gereja mengupayakan orang-orang yang belum Kristen itu bisa masuk ke dalam naungan kerajaan Allah. Karena para raja dan bangsawan itu adalah warga Gereja, maka sejalan dengan semboyan “Imamat Am Orang Percaya” bahwa mereka juga terpanggil untuk membaharui Gereja dan mengambil bagian dalam pelayanan Gereja terutama dalam memberantas kejahatan dan mengupayakan perikehidupan yang kristiani. Dengan alasan itu pula maka Luther setuju bila orang Kristen duduk dalam pemerintahan. Ia menerima pandangan Augustinus yang mengatakan bahwa pemerintahan Kristen

²⁸ MangisiSE. Simorangkir, Op.Cit.,90.

²⁹ Marthin Luther, *Katekismus Besar*, terj. Anwar Tjen, (Jakarta: BPK-GM, 1996), 63-65.

³⁰ MangisiSE. Simorangkir, Op.Cit., 92-93.

³¹ Jan S. Aritonang, *Garis Besar Sejarah Reformasi*, (Bandung: Jurnal Info Media, 2007), 127.

³² Alister E. McGrath, Op.Cit., 270.

harus memerintah dengan akal, kasih dan kehendak baik.³³ Pemerintah atau pangeran-pangeran itu harus tetap melaksanakan tugas ilahi (Luther mengacu pada Roma 13:1-7, I Petrus 2:13-14).³⁴

III.4. Penutup: Analisa

Gereja dan Negara menurut Martin Luther harus dipisahkan meskipun sebenarnya bersinggungan. Pemisahan itu, Luther menggunakan ajaran tentang “dua kerajaan” atau “dua pemerintahan”. Namun dikatakan bersinggungan karena sama-sama melakukan pekerjaan yang diamanatkan Tuhan demi memanusiakan manusia. Gereja sebagai bagian dari warga Negara RI dan makhluk sosial, yang tidak menutup kerjasama dengan Pemerintah dalam membangun manusia seutuhnya. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah adakah ajaran “Dua Kerajaan Luther” hadir di Negara Republik Indonesia saat ini? secara ringkas dapat disebut ada jika pendekatannya dari sudut pemisahan kekuasaan sebagai unsur penting. Namun dikatakan tidak ada, jika kita melihat keadaan Gereja mencampuri urusan Negara, bahkan lebih memfokuskan pada bagian politik lalu mengabaikan pelayanan, dan pengembalaan. Akan tetapi jika kita menganalisa secara umum di Negara kita ini bahwa mayoritas masyarakat tidak mengenal ajaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya para Pendeta kurang mendalami ajaran Luther ini sehingga sulit menerapkannya dalam kehidupan jemaat. Kesulitan mereka yaitu, tidak mengetahui bahwa kedua kerajaan itu berasal dari Allah. Banyak para penguasa tidak memerintah sesuai kehendak Allah tetapi yang terjadi adalah menindas rakyat oleh kekorupsian mereka. Demikian pula dengan para Hamba Tuhan yang tidak mau melayani dengan tulus sehingga yang terpikirkan adalah kemakmuran.

Siapakah Gereja dan Negara itu? Dalam konsep Gereja rakyat, bukankah orang yang di dalam Gereja itu adalah bagian dari masyarakat, dan itu juga yang menjalankan pemerintahan? Jawabnya, memang demikian, sebab orang Kristen hidup didalam dunia, kakinya berdiri sebelah di kawasan Gerejawi dan satu lagi di kawasan duniawi. Dalam masyarakat yang nonKristen prinsip itu bisa berlaku. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa Luther melihat kedua kekuasaan itu sebagai dua lingkaran yang terpisah tetapi bersinggungan secara fleksibel pada bagian tertentu. Luther melihat kedua kekuasaan itu berpusat pada Kristus. Dengan demikian Gereja dan dunia ini adalah milik Kristus.

III.5. Pengaruh Luther Terhadap Transformasi Politik Calvin

Salah satu transformasi sosial yang paling terasa dari Reformasi Protestan (khususnya Calvinisme) terlihat dari sistem perpolitikan modern. Hampir seluruh pemerintahan di dunia saat ini memakai sistem demokrasi yang berformat republik. Tercatat 147 dari 206 negara di dunia memakai republik sebagai nama resminya, belum lagi negara yang tidak memakai istilah republik tapi faktanya melakukan sistem perpolitikan ini.³⁵ Sistem republik telah dikenal sejak zaman Yunani kuno,

³³MangisiSE.Simorangkir,Op.Cit.,91.

³⁴Alister E.McGrath,Op.Cit.

³⁵<https://en.wikipedia.org/wiki/Republic>.

namun corak perpolitikan republik modern adalah bentuk khas milik Calvinisme.³⁶ Prinsip pemerintahan Jenewa diakui oleh kaum Puritan sebagai model pemerintahan Kristen yang hampir sempurna.³⁷ Bisa dibilang warisan paling abadi dari tradisi Calvinisme adalah penekanan pada kedaulatan rakyat dan hak melawan tirani. Setelah hadirnya Calvin, pandangan politik ini diterima secara luas di seluruh dunia, di mana pada abad-abad sebelumnya dipandang sebagai pandangan yang radikal. Bisa dibilang, prinsip Calvinis yang telah melepaskan seluruh dunia dari ikatan tirani para raja di abad sebelumnya dan membawa seluruh sejarah umat manusia memasuki zaman demokrasi modern.

III.6. Reformasi

Sebelum Reformasi, posisi Gereja sangatlah dominan dan disertai aktivitas-aktivitas korup dari para rohaniwan dan pemerintah. Sebenarnya pada masa ini mulai muncul republik-republik kecil yang berusaha melawan pola sentralisasi dan monarki yang telah bertahan berabad-abad. Namun salah satu penyebab sulitnya perubahan dilakukan adalah akibat ajaran Gereja yang mewajibkan ketundukan mutlak umat Kristen kepada pemerintahan yang berkuasa. Ajaran Gereja Abad Pertengahan didominasi oleh sosok Thomas Aquinas di mana ia juga menulis beberapa karya tentang perpolitikan. Ia berpendapat bahwa pemerintahan tunggal oleh raja adalah bentuk pemerintahan terbaik. Ditambah lagi kuatnya campur tangan Gereja dalam setiap bidang kehidupan telah menyebabkan peradaban manusia tertinggal selama berabad-abad.³⁸ Maka Reformasi Protestan yang dimulai dengan melakukan reformasi doktrin berakhir pada reformasi seluruh tatanan masyarakat.

Tokoh awal yang memulai Reformasi ini adalah Martin Luther. Bagi Luther, terdapat dua “kerajaan” yang harus dipisahkan yaitu Gereja dan pemerintah. Allah memimpin Gereja melalui Injil-Nya, dan memimpin dunia melalui anugerah umum-Nya. Luther menyebutnya dengan kerajaan tangan kiri dan kerajaan tangan kanan karena keduanya dipimpin oleh tangan Allah. Bagi Luther, pemerintah hadir karena dosa. Allah yang melindungi Kain dari ancaman pembunuhan, setelah ia membunuh Habel. Maka konsekuensinya, Luther merasa bahwa pemerintahan lebih bertujuan untuk mengatur orang tidak percaya ketimbang orang percaya. Pandangan lebih negatif terhadap pemerintah membuat

³⁶George Brancroft, *Literary and Historical Miscellanies*, 1855.

³⁷E. William Monter, *Calvin's Geneva*, 1967.

³⁸*Gereja belum menunjukkan alamat hidup baru*. Sebaliknya: gerakan pembaruan yang dimaksudkan oleh konsili-konsili pada abad ke-XV gagal belaka karena Paus-paus melawannya. Umumnya orang merasa tak senang dan kurang puas karena keadaan Gereja yang buruk itu, tetapi tak ada yang tahu mengubahnya. Orang mengeluh dan mengeritik saja, umpamanya tentang kelobaan paus atau kelakuan rahib-rahib dan klerus bawahan yang tak senonoh itu, tetapi tiada seorang yang berani menyerang ajaran dan peraturan Gereja sendiri, karena Gereja yang diduniakan dan najis itu masih tetap menjadi satu-satunya pengantara bagi manusia untuk beroleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab takutnya terhadap neraka dan api penyucian maka orang banyak tetap saja taat kepada kuasa Paus dan Gereja Roma. Bukan sedikit orang yang mengejar ketenteraman hati dan ingin supaya berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi segala perkara itu tak dapat menghasilkan suatu pembaruan yang benar. H. Berkhof & I.H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 119.

Luther gagal memberikan kontribusi signifikan pada transformasi politik seperti yang Calvin lakukan. Ditambah lagi Luther juga menekankan *passive obedience* di mana orang Kristen harus rela dianiaya oleh pemerintah yang zalim. Tokoh Reformasi kedua adalah Zwingli. Senada dengan Luther, Zwingli menekankan pemisahan kekuasaan antara Gereja dan pemerintah. Jadi bisa kita lihat, tokoh-tokoh sebelum Calvin belum mampu membuat terobosan berarti selain pemisahan kekuasaan.

III.7. Tantangan

Namun dominasi Calvinisme tidak bertahan lama, zaman enlightenment telah mendorong manusia untuk mencari teori-teori alternatif di luar Calvinisme. Dalam beberapa tahun terakhir orang-orang lebih tertarik pada model Revolusi Prancis yang bersumber dari teori kontrak sosial ketimbang model Jenewa yang bersumber dari Calvin. Fondasi-fondasi negara mereka yang bercorak Calvinisme mulai diganti dengan paham humanistik. Pemisahan total antara pemerintah dan gereja membuat pemerintahan kehilangan identitasnya untuk memuliakan Tuhan, selain itu posisi gereja pun ditekan sampai kewilayah privat. Ditambah lagi sekularisasi disegala bidang dalam dekade terakhir telah membuat lunturnya nilai-nilai Calvinisme di dunia Barat. Pajak yang dibayarkan orang-orang Kristen dengan hati tulus pada akhirnya malah digunakan untuk mendukung proses sekularisasi tersebut.

Merosotnya nilai-nilai kekristenan disertai kekalahan demi kekalahan terus dialami orang-orang Kristen di Amerika yang di mana pada tahun lalu konstitusi Amerika melegalkan LGBT. Invasi humanisme dan sekularisme belum berhenti, usaha-usaha melegalkan praktik aborsi dengan slogan "*pro-choice*", meredefinisikan konsep pernikahan tradisional, penghapusan kata Tuhan dalam area-area yang strategis, serta pelunturan nilai-nilai Kristen yang lainnya terus gencar dilakukan. David Hall menyebutkan ada lima hal yang menjadi penyebab kekalahan Calvinisme terhadap sekularisme di dunia Barat.³⁹ Pertama, adalah penyebaran pemikiran *enlightenment* dalam dunia intelektual. Kedua, munculnya alternatif filosofis yang lebih bersifat *humanistik*. Ketiga, revolusi industri yang mengubah struktur komunal keluarga tradisional. Keempat, Darwinisme yang merelativisasi nilai-nilai moral manusia. Kelima, dominasi Arminianisme di kalangan Injili yang menekankan kehidupan rohani secara pribadi sehingga individualisme dengan cepat menembus gereja.

III.8. KESIMPULAN

Pada abad pertengahan fungsi Gereja dan Negara telah tercampur baur. Gereja mengurus kehidupan Negara demi memperoleh keuntungan sehingga pelayanan dan pengembalaan diabaikan. Para penguasa pun tidak mengakui klaim supremasi Gereja atau Paus atas Negara. Tetapi oleh anugerah Tuhan ia memperlakukan hambanya (Martin Luther) untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan Gereja dan Negara. Luther mengatakan bahwa hubungan Gereja dan Negara bukanlah suatu musuh dan bukan juga gereja yang berkuasa atas Negara, demikian sebaliknya. Tetapi Luther di sini memberikan pemahaman kepada Gereja dan Negara bahwa

³⁹David Hall, *Calvin in the Public Square*, 2009.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL)

Vol. 6 No. 4 (2025): December 2025

E-ISSN: 2774-2245

Gereja adalah mitra dari Negara dan juga Negara adalah mitra dari Gereja tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berkuasa, tetapi menurut Luther Gereja tetap berada di bawah pemerintahan namun pemerintah tidak menjadi hakim di dalam Gereja tersebut melainkan menjadi sahabat dalam menyelesaikan masalah dan juga Gereja bukanlah yang mengatur Negara melainkan yang memberikan pemahaman tentang hal yang dikatakan firman Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Battles, F. L. (trans.), *Institution of the Christian Religion* (Atlanta, 1975. 1541)
- Berkhof H., & Enklaar I.H., *Sejarah Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).
- Calvini, Ioannis, *Instutio Religionis Christianae*, Basel, 1536, trans. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, terj. Ford Lewis Battles, ed. rev. (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).
- , *Institutio, Pengajaran Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980).
- , *Institutes of the Christian Religion*, 2001.
- Duffield, John, ed. *John Calvin*. (Grand Rapids: Eerdmans, 1966).
- Enns, Paul, *The Moody Handbook of Theology*, buku pegangan teologi, jilid 1 & 2, (Malang: Literatur SAAT, 2006).
- End, Th. Van den, *Harta Dalam Bejana*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982).
- Fuhrmann, Paul T., "Philip Mornay and the Huguenot Challenge to Absolutism" dalam *Calvinism and the Political Order*, ed. George L. Hunt, (Philadelphia: Westminster Press, 1965).
- Gargill Thompson, W. D. J., "The "Two Kingdoms" and the "Two dies in the Reformation: Luther to Hooker", ed. C. W. Dugmore, (London, 1980).
- Hopfl, Harro, *The Christian Polity of John Calvin*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
- Jonge C., De, *Apa itu Calvinisme ?*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).
- Kristanto, Billy, ed., *Aspek-Aspek Dalam Pemikiran John Calvin*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2012).
- Mangisi SE. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan Luther*, (Pematang siantar: kalportase pusat GKPI; 2008).
- McQueen, J., "The Origin and Dynamics of Society and the State According to St. Augustine", (Augustinian Studies 4, 1973).
- McGrath, Alister, E., *A Life of John Calvin*, Cambridge, (MA: Basil Blackwell, Ltd, 1990).
- , *Sejarah Pemikiran Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).
- Meeter, H. Henry, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2014).
- Norton, T. (trans.), *Institution of the Christian Religion*, (London, 1561). the first translation into English.
- Selderhuis, Herman J., *Buku Pegangan Calvin*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2017).